

KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEBIJAKAN EKONOMI

Oleh : Hayuni R.¹⁾

Kenyataan di masyarakat, kehidupan ekonomi terbelah-belah menjadi kehidupan ekonomi masyarakat bawah, menengah dan atas. Yang diartikan dengan kehidupan ekonomi adalah kemampuan yang diukur dari keuangan, pendapatan, produksi dan konsumsi (termasuk transportasi dan lain-lain serta tabungan) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersangkutan kemudian dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang berlaku sudahkah Memberikan fasilitas kepada kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

I. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT TINGKATAN BAWAH (Dilihat dari segi pendapatan)

Tingkatan bawah diberi konotasi dengan pendapatan antara Rp. 3.333,74 s/d Rp. 50.000 per hari (untuk kota). Dengan pendapatan seperti itu harus mampu menyelenggarakan kehidupannya dihari itu. Apabila individu yang bersangkutan disiplin, maka mereka akan berpikir bagaimana harus menghasilkan sesuatu. Bagaimana harus

mengeluarkan untuk konsumsi dan harus menabung (menyimpan sebagian hasil) dalam rangka menghasilkan sesuatu ten tu saja dibutuhkan modal. Sistem pencarian modal dilakukan dengan berbagai cara. Masyarakat tingkatan bawah biasanya melakukannya secara kecil-kecilan (biasanya gali lubang tutup lubang) melalui : Pinjaman dari bank, Gadai, Arisan, Pinjaman dari rentenir dan asli dari pendapatannya. Mereka mengeluarkan untuk konsumsi dan transportasi rata-rata untuk :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. a. Makanan (lauk pauk) dan beras mengandalkan pada sumbangan/pemberian orang biasanya ini yang melakukan pekerjaan sebagai buruh. | → 0 % dari seluruh pendapatannya |
| b. Makanan (lauk pauk saja) beras mengandalkan pada sumbangan/pemberian orang. | → 25 % dari seluruh pendapatannya |
| c. Makanan (lauk pauk dan beras) semua ditanggung sendiri. | → 37 % dari seluruh pendapatan |
| d. Untuk yang dagang makanan biasanya lebih besar dari 100 % karena ditambah dengan modal untuk keluarganya sekalian diperhitungkan dalam biaya dagangan. | → 100 % dari seluruh pendapatannya + modal |

1) Penulis adalah Dosen STIA LAN Bandung dan Staf pada Litbang PKDA I LAN

2. Transportasi :
 - a. Yang bekerja : Mengandalkan bantuan dari tempat bekerjanya. → 0 % dari seluruh pendapatannya
 - b. Yang tidak bekerja : untuk transportasi anak sekolah. → 15 % dari seluruh pendapatannya
 - c. Yang bekerja dengan transpor : Angkot dan untuk anak sekolah. → 24 % dari seluruh pendapatannya
3. Lain-lain : Tempat tinggal, air dan listrik, dll (masih dalam rangka kebutuhan primer).
 - d. Yang mendapat bantuan dari pihak lain.
 - e. Yang membayar/membiayai sendiri 50 % dari seluruh pendapatannya.

Setelah pendapatannya selesai dikurangi dengan semua kebutuhan yang harus dibayar/dikeluarkan biayanya biasanya sisa tersebut ditabung. Penabungan ini :

Ada yang bisa menabungkan pendapatan seluruhnya (100 %).

Ada yang bisa menabung hanya sebagian pendapatannya saja biasanya 15 % dari pendapatan seluruhnya.

II. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT MENENGAH (Dilihat dari segi pendapatannya)

Tingkatan menengah dari kehidupan ekonomi diberi konotasi pendapatan sekitar diatas Rp. 50.000 s/d Rp. 1.000.000 per hari.

Dengan pendapatannya saja mereka bisa memenuhi kebutuhan produksi, konsumsi maupun tabungannya tanpa bantuan orang lain, bila menginginkan bantuan biasanya mereka mudah memperoleh kepercayaan-kepercayaan dari berbagai segi kehidupan. Pengeluaran lain-lainnya biasanya meliputi kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti segala macam amalan dan gengsi biasanya lebih besar porsinya daripada kebutuhan primernya.

III. KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT TINGKATAN ATAS (Dilihat dari segi pendapatannya)

Konotasi pendapatan untuk golongan atas adalah antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000 atau lebih per hari. Dalam melaksanakan kebutuhan hidup sehari-harinya dengan pendapatan sebesar itu mungkin juga cukup atau mungkin juga kurang karena gaya hidup masyarakat tingkatan atas ini sangat berbeda. Segala macam pelaksanaan kebutuhan hidupnya biasanya dilaksanakan oleh orang lain inilah yang menyebabkan tidak cukup. Gaya hidup yang semacam itu memang sudah dibudayakan aturan-aturannya secara protokoler dan turun-temurun.

Sumber untuk mengintrepretasikan kehidupan masyarakat tingkat bawah, menengah dan atas adalah statistik Indonesia : BPS, Hasil pendataan keluarga miskin Prop. Jabar : BKKBN dan observasi penulis.

Kemudian kita lihat pada sisi variabel lainnya yaitu kebijakan ekonomi menurut kamus ekonomi Prof.Dr. Winardi SE dan juga tafsiran penulis " Policy Economic/Politik Ekonomi/Kebijakan Ekonomi " adalah

keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi secara langsung kehidupan ekonomi dengan satu atau lain cara. 4 hal yang penting dalam tindakan pemerintah sehubungan dengan kehidupan ekonomi adalah :

1. Adanya suatu orde, struktur kehidupan ekonomi.
2. Tujuan-tujuan/sasaran-sasaran yang ditetapkan pemerintah.
3. Alat-alat untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Akibat penerapan alat-alat tersebut untuk bagian daripada kehidupan ekonomi.

Perkataan ekonomi pada politik ekonomi/kebijakan ekonomi harus dipandang secara luas. Hal tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan ekonomi yang mempunyai cakupan :

- a. Kebijakan harga dan upah
 - b. Kebijakan produksi
 - c. Kebijakan sosial
 - d. Kebijakan uang (fiskal dan moneter)
 - e. Kebijakan internasional
1. Adanya suatu orde tersebut diatas Arief Ramelan Karseno menyatakan bahwa

Pada masa orde lama : Pertumbuhan ekonomi sangat lambat karena pemerintah orde lama masih banyak menghadapi persoalan-persoalan stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah orde lama lebih terpaku pada pembangunan politik daripada pembangunan ekonomi.

Pada masa orde baru : pada masa ini Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara yang berhasil didalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Kurun waktu antara '87 s/d '97 PDRB Indonesia meningkat rata-rata 7 % per tahun dibandingkan negara lain

hanya mencapai kurang dari 4 % per tahun.

Pada masa yang akan datang : Persoalan yang muncul adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Apabila di masa lalu pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada anggaran pemerintah, maka di masa mendatang ekonomi Indonesia akan lebih tergantung pada keberhasilan sektor swasta. Kemampuan sektor swasta mengisi kebutuhan investasi.

Struktur ekonomi Indonesia (termasuk daerah-daerah khususnya Jawa Barat) menurut Rizal Ramli struktur ekonomi kita digambarkan bagaikan sebuah piramida. Bagian bawah piramida mempunyai struktur yang sangat kompetitif dan hambatan masuk yang rendah sehingga Tk keuntungan tipis. Kebanyakan usaha skala menengah dan bawah/kecil sangat lambat. Sebaliknya bagian atas piramida mempunyai struktur yang quasi monopolistik lisensi-lisensi dan kemudahan diberikan oleh pemerintah seperti kredit bunga murah tsb. Ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Tujuan-tujuan/prospek yang ditetapkan pemerintah untuk perekonomian daerah (berdasarkan prediksi) kantor BI Bandung.
 - a. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan positif disebabkan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa dan produk-produk agrobisnis.
 - b. Inflasi diperkirakan mengalami peningkatan akibat musim-musim libur.
 - c. Kinerja perbankan diperkirakan semakin baik disebabkan oleh

kecenderungan penurunan suku bunga bank, baik simpanan maupun pinjaman dan bertambahnya likuiditas bank dan fungsi intermediasi bank yang Memberikan perhatian pada sektor riil khususnya UKM.

d. Menurut Propenas 2000-2004 pemulihan ekonomi lamban disebabkan karena :

- 1) Mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif.
- 2) Kesenjangan ekonomi pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku dan antar golongan pendapatan.

3. Alat-alat untuk mencapai tujuan/sasaran

- a. Sektor swasta (dalam negeri maupun asing) yang mendorong para investor.
- b. Peningkatan pendapatan pajak (kebijakan fiskal)
- c. Perkembangan bisnis.

Itu semua ditunjang oleh stabilitas politik, infrastruktur hukum yang jelas, sistem keuangan dan perbankan yang sudah ada tapi tidak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan moneter yang bersifat kejutan-kejutan.

Kebijakan fiskal menurut Sadono Sukirno meliputi :

- a. Membuat perubahan keatas perbelanjaan pemerintah.
- b. Membuat perubahan dalam jumlah pajak atau sistim pajak.

Kebijakan moneter bertujuan untuk melakukan perubahan keatas 2 variabel mikro yaitu suku bunga dan penawaran uang.

Melihat kepada uraian yang telah panjang lebar di halaman-halaman terdahulu maka kita berkesimpulan kebijakan-kebijakan yang mana yang memberi fasilitas/prioritas kepada kehidupan ekonomi masyarakat tingkat bawah, menengah dan atas yang mempunyai transaksi dengan pihak lain misalnya dalam :

a. Kebijakan fiskal (yang berhubungan dengan pengenaan pajak menjangkau masyarakat sampai batas :

1) Wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp. 11.520.000 itu berarti sudah Memberikan fasilitas kepada masyarakat/orang yang bermodal dan berpenghasilan dibawah jumlah tsb diatas untuk tidak dikenakan pajak penghasilan (WP orang pribadi).

2) WP Badan dalam negeri juga sudah Memberikan fasilitas kepada badan yang berkeuntungan sekecil-kecilnya untuk hanya kena 10 % saja tidak terkena yang 15 % ataupun 30 % (uu RI no.17/2000 tentang pajak penghasilan).

b. Kebijakan moneter menurut BI difokuskan untuk terus memperkuat stabilitas moneter melalui stabilitas harga dan nilai tukar. Laju inflasi yang rendah akan membantu menstabilkan nilai tukar rupiah sehingga mempercepat proses penyehatan perbankan dan dunia usaha khususnya yang dibebani masalah utang luar negeri M.Sadli (Miranda : 2002) Dalam masa inflasi para kreditur dan penerima pendapatan tetap akan menderita rugi. Kenaikan suku bunga surat-surat berharga akan menimbulkan kerugian bagi kreditur (Hartowo '85).

c. Kebijakan produksi dalam kegiatan perekonomian Indonesia (termasuk daerah-daerah) menggolongkan kegiatan produksi seperti yang sudah kita kenal bersama dalam 11 lapangan usaha dan kebijakan produksi yang diterapkan seperti tersebut diatas akan menjangkau kehidupan ekonomi masyarakat tingkatan bawah, menengah maupun atas dengan

berbagai kesempatan kerja dan mendapatkan kompensasi walaupun mungkin belum semua angkatan kerja terserap.

- d. Kebijakan ekonomi internasional meliputi : perdagangan barang (AFTA/ASEAN FREE TRADE AREA), lalu lintas jasa (AFAS/ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES), Modal (dalam arti investasi) (AIA/ASEAN INVESTMENT AREA), Tenaga kerja dibentuk (CM/COMMON MARKET) M.Sadli (Hadi Soesastro) ini hanya menjangkau langsung kepada kehidupan masyarakat menengah dan atas tetapi golongan/tingkatan masyarakat bawah hanya menerima akibat saja dari kebijakan tersebut.
- e. Kebijakan harga dan upah diarahkan kepada menjaga tingkat inflasi jangan sampai mendapatkan hiperinflasi (diatas 20 %) (Hartowo) sedangkan upah diarahkan kepada :
- 1) Pendapatan minimal sesuai dengan UMR.
 - 2) Menurunkan diskriminasi gender M.Sadli (Ari A. Perdana : 221'02).

Suatu pernyataan untuk menutup tulisan ini bahwa apabila pembuatan kebijakan lebih diorientasikan kepada kepentingan penerimaan, maka kepentingan masyarakat akan terabaikan, apabila pembuatan kebijakan lebih diorientasikan kepada kepentingan masyarakat, maka penerimaan otomatis akan terpenuhi. (Baban Sobandi : 179'02).

DAFTAR REFERENSI/KEPUSTAKAAN

1. Arief Ramelan Karseno dkk (Agenda AKSI), Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UI bekerjasama dengan PT. Tiara Wacana, Yogya '97
2. BPS, Statistik Indonesia, 2002
3. BKKBN, Hasil Pendataan Keluarga Miskin, Prasejahtera dan Sejahtera Prop.Jabar
4. Baban Sobandi, Etika Kebijakan Publik Prinsip dan Strategi Moral Perbaikan Kinerja Pemerintah, Penerbit Mutiara Ilmu, Bandung, 2002
5. Hartowo, Pengantar I Ekonomi, Modul UNIVERSITAS TERBUKA '85
6. Laporan Kantor Bank Indonesia Bandung, 2003/2004
7. M.Sadli, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru, Penerbit Kompas Jakarta, 2002
8. Obyektivitas dan wawancara kepada masyarakat tingkatan bawah, menengah, dan atas dilihat dari tingkat pendapatannya
9. Prof. DR. Winardi,SE, Kamus Ekonomi, Penerbit Mandar Maju Bandung '98
10. Propenas 2000 s/d 2004
11. Sadono Sukirno, Makro Ekonomi RI no.17'2000, Lintas Pajak Penghasilan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Kerja Sektor
Pegawai Negeri Atas Madya/Kota
1999-2002

...

...

...